

PENERAPAN PROGRAM SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs) DESA POLEWALI DALAM MENGURANGI KEMISKINAN

Adi Nawir¹, Syamsuddin², Jusniaty³

Universitas Muhammadiyah Sinjai ^{1, 2, 3}

adinawir@gmail.com ¹, syam.sinjaiku@gmail.com ²,
jusniaty@gmail.com ³

ABSTRACT

Abstract: This study aims to determine how the implementation of the Sustainable Development Goals (SDGs) Program in Polewali Village in reducing poverty. Using this type of qualitative research. The results of the study suggest that the implementation of the Polewali Village Sustainable Development Goals (SDGs) Program has been implemented in accordance with the circular letter of the Ministry of Villages regarding the implementation of the SDGs Program. Even though the SDGs Program is still in the planning stage of how the sustainability program will be, related to the implementation of the Sustainable Development Goals (SDGs) it is still not felt by the Polewali Village community, but its implementation has been carried out well. Judging from the Village Government which has carried out data collection directly to the community by updating data once in 3 months. The results of this data collection will become a reference for the Government itself to carry out village planning starting from development planning and strategies that must be carried out in terms of especially in the field of poverty. The Polewali Village Government in implementing the SDGs program to reduce poverty has done things that are able to reduce the poverty rate in Polewali Village in accordance with the objectives of the SDGs program, namely: increasing the income of the poor, ensuring access to village services, and protecting the entire community from all forms of disaster.

Keyword: *Implementation, Sustainable Development Goals, Poverty, Village Government*

ABSTRAK

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Program Sustainable Development Goals (SDGs) di Desa Polewali dalam mengurangi angka kemiskinan. Menggunakan jenis penelitian Kualitatif. Hasil penelitian mengemukakan bahwa penerapan Program Sustainable Development Goals (SDGs) Desa Polewali telah diterapkan sesuai dengan surat edaran Kementerian Desa tentang pelaksanaan Program SDGs. Meskipun Program SDGs ini masih dalam tahap perencanaan bagaimana program keberlanjutan, terkait dari implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) ini masih belum dirasakan

oleh masyarakat Desa Polewali, namun untuk penerapannya sudah terlaksana dengan baik. Dilihat dari Pemerintah Desa yang telah melakukan pendataan langsung kepada masyarakat dengan pembaharuan data 1 kali dalam 3 bulan. Hasil dari pendataan inilah yang akan menjadi acuan dari Pemerintah itu sendiri untuk melakukan perencanaan Desa mulai dari perencanaan pembangunan dan strategi yang harus dilakukan dalam hal khususnya di bidang kemiskinan. Pemerintah Desa Polewali dalam penerapan program SDGs untuk mengurangi angka kemiskinan telah melakukan hal yang mampu mengurangi tingkat angka kemiskinan di Desa Polewali sesuai dengan tujuan dari program SDGs yaitu: meningkatkan pendapatan masyarakat miskin, menjamin akses terhadap pelayanan desa, dan melindungi seluruh masyarakat dari segala bentuk bencana.

Kata kunci: Penerapan, Sustainable Development Goals, Kemiskinan, Pemerintah Desa

PENDAHULUAN

Kemiskinan sampai sekarang menjadi persoalan yang tidak pernah hilang di dunia. Dunia menanggapi dengan menyepakati suatu pertemuan pada September 2015 yang diikuti oleh 189 Negara dengan melahirkan deklarasi yang dikenal dengan *The Millenium Development Goals* (MDGs). Salah satu targetnya adalah mengurangi jumlah penduduk miskin hingga 50% pada tahun 2015. Deklarasi ini membuktikan bahwa kemiskinan masih menjadi masalah besar yang harus ditanggulangi bersama (Ishartono et al., 2017). Dengan berakhirnya MDGs yang berhasil mengurangi penduduk miskin dunia hampir setengahnya, selanjutnya lahirlah *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang muncul saat pertemuan pada tanggal 25-27 September 2015 di markas besar PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa), New York, Amerika Serikat. Acara tersebut merupakan lahirnya kesepakatan pengesahan dokumen SDGs yang dihadiri perwakilan dari 193 Negara. Acara ini merupakan lanjutan dari kesepakatan dokumen SDGs pada tanggal 2 Agustus 2015 yang berlokasi di New York. Saat itu sebanyak 193 negara anggota PBB mengumumkan dokumen berjudul “*Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*” atau “Mengalihkan Dunia Kita: Agenda Tahun 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan.” Dokumen SDGs pun lahir untuk meneruskan dan memantapkan capaian-capaian MDGs sebelumnya agar berlanjut hingga seterusnya (Raharjo & Ishartono, 2014)

Negara berkembang seperti Indonesia, kemiskinan menjadi persoalan sosial yang terus muncul dan menjadi beban berat bagi Negara. Kemiskinan masih menjadi permasalahan yang kompleks dan menjadi sebuah permasalahan besar yang harus segera ditanggulangi (Amalia, 2019). Tingginya kesenjangan sosial yang disebabkan karena tidak meratanya kesejahteraan di Indonesia menjadi penyebab utama kemiskinan. Kemiskinan menjadi salah satu ukuran terpenting untuk mengetahui tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga. Sebagai suatu ukuran agregat, tingkat kemiskinan di suatu wilayah digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan di wilayah tersebut (Todaro & Smith, 2014).

Kemiskinan adalah keadaan dimana ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Permasalahan standar hidup yang rendah berhubungan dengan pendapatan yang rendah, perumahan yang kurang layak, kesehatan dan pelayanan kesehatan yang buruk, dan tingkat pendidikan masyarakat yang rendah sehingga berakibat pada rendahnya sumber daya manusia dan banyaknya pengangguran. Adanya keterbelakangan dan ketertinggalan sumber daya manusia, ketidaksempurnaan pasar, dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktivitas (Clarke & Erreygers, 2020; Ravallion, 2020; Wang et al., 2020). Rendahnya produktivitas mengakibatkan rendahnya pendapatan yang diterima sehingga berdampak pada rendahnya tabungan dan investasi yang akibatnya pada rendahnya akumulasi modal sehingga penciptaan lapangan pekerjaan rendah. Istilah kemiskinan muncul ketika seseorang atau sekelompok orang tidak mampu mencukupi tingkat kemakmuran ekonomi yang dianggap sebagai kebutuhan minimal dari standar hidup. Penyebab kemiskinan juga mengenai fenomena pendapatan rendah, pendidikan rendah, gizi rendah, pertumbuhan yang tidak jalan, cara berpikir menjadi kurang kreatif dan tidak produktif sehingga tingkat pengangguran meningkat dan pendapatan rendah. Dapat dilihat persoalan kemiskinan berputar-putar disitu terus, hingga akhirnya terjadi juga pada keturunan mereka dan semakin sulit untuk keluar dari kemiskinan (Amani et al., 2020; Brady, 2019; Kola & Owumi, 2019; Waheed Olowa, 2012).

Beberapa daerah di Indonesia memiliki tingkat kemiskinan yang berbeda dari sisi jumlah maupun persentasenya. Keadaan demografis, jumlah penduduk, hingga kebijakan daerah masing-masing dapat menjadi faktor yang mempengaruhi hal tersebut. Provinsi Sulawesi Selatan salah satu Provinsi berpenduduk miskin di Indonesia, hal tersebut didorong oleh semakin banyaknya jumlah populasi penduduk. (Haywood & Boihang, 2021). Sedangkan beberapa faktor lain yang dapat mempengaruhi kemiskinan di suatu daerah yaitu pengangguran, pendidikan. Pada poin pertama, Tujuan SDGs adalah tanpa kemiskinan sedangkan kemiskinan sudah menjadi fenomena sepanjang sejarah kemanusiaan. (Bontempi et al., 2021)

Komitmen dalam mengimplementasikan SDGs desa di Desa Polewali secara penuh di seluruh dusun di Desa Polewali baik pada tingkat RT/Rw, per kepala keluarga, per individu yang sejalan dengan pelaksanaan visi pembangunan nasional. Pelaksanaan di tingkat desa dan komitmen pencapaian SDGs dirumuskan ke dalam dokumen RAD yang penyusunannya dilakukan secara bersama-sama antara pemerintah Desa Polewali dan BPD melibatkan seluruh element masyarakat, organisasi masyarakat, pelaku usaha, akademisi dan pihak terkait lainnya.

Rencana Aksi Desa polewali dalam penerapan SDGs desa bersama seluruh pihak terkait di Desa Polewali merupakan program untuk melakukan lompatan dengan cepat angka kemiskinan. Program ini diharapkan bisa menekan angka kemiskinan dengan cepat dan menekan kesenjangan sosial di desa polewali, Lalu memberikan kesempatan kepada penduduk miskin untuk mendapatkan akses ekonomi, pendidikan dan kesehatan. Mengingat Surat Edaran Kementerian Desa Tertanggal 1/03/2021 tentang pelaksanaan program SDGs menjadi perhatian semua orang di desa mulai bulan Maret sampai Mei 2021 dengan prinsip kerja sama dan gotong royong dan komitmen jelas dengan sinergitas program dalam penanggulangan kemiskinan.

Desa Polewali merupakan desa yang terjauh di Sinau Selatan yang memiliki jumlah penduduk kurang lebih 1989 jiwa, akan tetapi permasalahan yang di hadapi masih memiliki masalah kemiskinan, Penduduk miskin yang ada di desa yang tersebar di lima dusun yang ada di desa polewali, yang mempunyai tempat tinggal seadanya, upah pendapatan yang di dapat tidak sesuai dengan besarnya

pengeluaran, banyak pengangguran, yang mengakibatkan masih banyaknya penduduk miskin di desa polewali. Desapolewali yang sudah memiliki satatus desa yang berkembang pada tahun 2020/2021 yang sebelumnya berada pada desa tertinggal. Desa yang pesat membuat orang banyak untuk tinggal dan berusaha untuk hidup di dalamnya. Pemerintah Desa Polewali juga telah banyak menerapkan program-program pembangunan yang bertujuan untuk pengentasan kemiskinan. Namun, program-program ini belum memiliki strategi dan kebijakan yang tepat karena tidak langsung berpihak pada lapisan masyarakat yang paling miskin, tetapi hal ini membuktikan bahwa kemiskinan merupakan salah satu masalah sosial yang menyangkut kesejahteraan masyarakat Desa Polewali.

Tabel 1.1 Data Penduduk Berdasarkan Penerima Bantuan Pemerintah Tahun 2021

No	Nama Bantuan	Kategori Miskin	Jumlah Penerima Bantuan Pemerintah
1.	BLT DD	KK Miskin	183 KK
2.	PKH DINSOS	KK Miskin	117 KK
3.	BST DINSOS	KK Miskin	14 KK
Total KK Miskin			374 KK

Apabila dilihat secara keseluruhan, jumlah penduduk di Desa polewali mencapai angka 1989 dengan jumlah kepala keluarga 549 KK. Dengan melihat jumlah penerimaan bantuan miskin dan juga persentase penduduk miskin yang cukup tinggi sampai mencapai 70 persen penduduk Desa Polewali miskin, dapat dinilai bahwa pengentasan kemiskinan di desa polewali masih dinilai belum baik. Kasus kemiskinan di Desa Polewali bukan merupakan kasus yang baru lagi, persoalan ini sudah menjadi persoalan yang mendasar di bahas oleh Negara begitu juga Profinsi, kabupaten, Pemerintah kecamatan, dan bahkan pemerintah desa. Melihat Dari penjelasan diatas dan dapat dilihat ada banyak program yang haru dijalankan oleh pemerintah desa polewali, Penting untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program *Sustainable Development Goals (SDGs)* Desa di Desa Polewali dalam menjalankan program-program penanggulangan kemiskinan.

KAJIAN PUSTAKA

Sustainable Development Goals (SDGs)

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan upaya pembangunan berkelanjutan yang menjadi acuan dalam kerangka pembangunan dan perundingan negara-negara di dunia sebagai pengganti pembangunan global *Millenium Development Goals* (MDGs) yang telah berakhir di tahun 2015 (UNDP & World Bank Group, 2016; Woodbridge, 2015). SDGs memiliki beberapa tujuan, diantaranya menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia, dengan salah satu outputnya mengurangi angka Kemiskinan.

Setelah era MGDs yang sudah berakhir pada tahun 2015, kini telah disusun dokumen pembangunan baru untuk melanjutkan tujuan-tujuan yang belum sempat tercapai sembari menyempurnakan target-target yang lebih relevan dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan bagi masyarakat. Sebab itu, pembangunan pasca tahun 2015 mulai disusun dengan mengatasi hambatan-hambatan untuk memajukan pembangunan termasuk soal kemiskinan. Penyempurnaan tersebut melahirkan tujuan dan target yang tersusun dalam 17 poin tujuan dan 169 sasaran *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang akan berlaku hingga 2030 mendatang (Gazzola et al., 2020). *Sustainable Development Goals* (SDGS) dirancang sebagai kelanjutan dari *Millinium Development Goals* (MDGs), yang belum tercapai tujuannya sampai pada akhir tahun 2015. SDGs dapat diharapkan berkontribusi terhadap umat manusia dan yang terpenting adalah memperkuat perdamaian bagi semua masyarakat internasional dalam kebebasan yang luas dan dapat diharapkan dapat mengatasi kemiskinan dalam tantangan global saat ini dan merupakan prasyarat yang tidak dapat dilanjutkan untuk pembangunan berkelanjutan (Jokowi, 2020; Setiawan et al., 2021).

Ada lima prinsip mendasar SDGs yang menyeimbangkan dimensi ekonomi, social dan lingkungan yaitu manusia, bumi, perdamaian, kerjasama dan kemakmuran. SDGs memiliki 17 tujuan dan 169 sasaran, berbeda dengan MDGs yang hanya memiliki 7 tujuan dan 21 sasaran. Secara proses MDGs memiliki keterangan dalam penyusunan sampai pengimplementasian bersifat eksklusif dan

sangat birokratis tanpa melibatkan non-pemerintah, seperti civil society organization, sector bisnis swasta, serta kelompok lainnya yang ada di Indonesia. (Andari, 2021; Kambubuy & Budiasih, 2020; Trimulato et al., 2021; Wardoyo, 2020). SDGs Desa merupakan upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Maksud pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan Desa untuk pemenuhan kebutuhan saat ini dilakukan tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi Desa di masa depan. (Affandi et al., 2020; Permatasari et al., 2021; Sjaf et al., 2021; Surya, 2019).

Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kembali di tahun 2021. Prioritas Dana Desa Tahun 2021 diarahkan untuk program atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa sebagaimana tercantum dalam BAB II pasal 5 Permendes PDTT Nomor 13 tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021. Sementara penerapan tujuan pembangunan Desa yang dimandatkan oleh Undang-Undang Desa, orientasinya adalah untuk mewujudkan 8 (delapan) tipologi Desa dan 18 (delapan belas) tujuan SDGs Desa sebagai berikut:

Tabel 2. Tipologi Desa dan Tujuan SDGs

No	Tipologi Desa	Tujuan SDGs
1	Desa Tanpa Kemiskinan Dan Kelaparan	1. Desa tanpa kemiskinan 2. Desa tanpa kelaparan.
2	Desa Ekonomi Tumbuh Merata	3. Pertumbuhan ekonomi Desa merata 4. infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan 5. desa tanpa kesenjangan 6. konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan
3	Desa Peduli Kesehatan	7. Desa sehat dan sejahtera 8. Desa layak air bersih dan sanitasi 9. Kawasan permukiman Desa aman dan nyaman

- | | |
|--|--|
| <p>4 Desa Peduli Lingkungan</p> <p>5 Desa Peduli Pendidikan</p> <p>6 Desa Ramah Perempuan</p> <p>7 Desa Berjejaring</p> <p>8 Desa Tanggap Budaya</p> | <p>10. Desa berenergi bersih dan terbarukan</p> <p>11. Desa tanggap perubahan iklim</p> <p>12. Desa peduli lingkungan laut</p> <p>13. Desa peduli lingkungan darat</p> <p>14. Pendidikan Desa berkualitas</p> <p>15. Keterlibatan perempuan Desa</p> <p>16. Kemitraan untuk pembangunan Desa</p> <p>17. Desa damai berkeadilan</p> <p>18. Kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif</p> |
|--|--|
-

Melihat dari tujuan SDGs itu maka ada 17 sasaran yang perlu dicapai dari program SDGs yaitu: Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun (*No Poverty*), Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan meningkatkan gizi serta mempromosikan pertanian berkelanjutan (*Zero Hunger*), Menjamin hidup sehat dan meningkatkan kesejahteraan untuk semua usia (*Good Health and Well Being*), Memastikan pendidikan berkualitas yang inklusif dan adil serta memperomosisan kesempatan belajar seumur hidup (*Quality Education*), Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua wanita dan anak perempuan (*Gender Equality*), Memastikan ketersediaan dan pengelolaan air dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua (*Clean Water and Sanitation*), Memastikan akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua (*Affordable and Clean Energy*), Mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif, dan keberlanjutan lapangan kerja penuh dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua (*Decent Work and Economic Growth*) (Gazzola et al., 2020).

(Breuer et al., 2019; Shah & Acharya, 2021; et al., 2020) membangun infrastruktur yang tahan banting, mendorong industrialisasi yang inklusif dan keberlanjutan, serta mendorong inovasi (*Industry, Inovation, and Infrastructure*), Mengurangi ketimpangan di dalam dan antar negara (*Reduced Inequalities*), Menjadikan kota dan pemukiman aman, tangguh, inklusif, dan keberlanjutan (*Sustainable Cities and Communities*), Memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan (*Responsible Consumption and Production*), Mengambil

tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya (*Climate Action*), Melestarikan dan secara keberlanjutan menggunakan samudra, laut, dan sumber daya laut untuk pembangunan keberlanjutan (*Life Below Water*), melindungi, memulihkan dan mempromosikan penggunaan ekosistem darat secara keberlanjutan, mengelola hutan secara keberlanjutan, memerangi pengundulan gunung, dan menghentikan serta mengembalikan degradasi lahan dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati (*Life On Land*), Mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan keberlanjutan, memberikan akses keadilan bagi semua dan membangun lembaga yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan (*Peace, Justice and Strong Institutions*), dan Memperkuat sarana implementasi dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan keberlanjutan (*Partnership for The Goals*).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah menggunakan jenis Kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. informan penelitian ini adalah Kepala Desa Polewali, Sekertaris Desa Polewali, Staf Pemerintah Desa Polewali, Ketua BPD Desa Polewali dan Masyarakat, Teknik analisis data dilakukan dengan cara pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Kemudian sumber primer lainnya adalah hasil review artikel ilmiah bereputasi dari database scopus dengan proses bertahap malai dari pencarian artikel, pemetaan topik, analisis dan diskusi terkait SDGs.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Program *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa Polewali Dalam Mengurangi Angka Kemiskinan

Kemiskinan menjadi persoalan sosial yang terus muncul dan menjadi sebuah permasalahan besar yang harus segera di tanggulasi. Beberapa daerah memiliki tingkat kemiskinan yang berbeda dari sisi jumlah maupun presentasenya. Keadaan demografis, jumlah penduduk, hingga kebijakan daerah masing-masing dapat menjadi faktor yang mempengaruhi hal tersebut. Desa Polewali, Kecamatan Sinjai Selatan merupakan salah satu daerah yang berpenduduk miskin, hal tersebut

didorong oleh semakin banyaknya jumlah populasi penduduk dan pendapatan penduduk yang rendah. Data kemiskinan di Desa Polewali dari tahun 2020 ke tahun 2021 mengalami peningkatan dimana bisa dilihat jumlah penerima bantuan miskin tahun 2021 lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2020.

Tabel 3. Jumlah Penerima Bantuan Pemerintah Tahun 2020-2021

No	Jumlah Penerima Bantuan Pemerintah		Nama Bantuan	Kategori Miskin
	Tahun 2020	Tahun 2021		
1.	170 KK	183 KK	BLT DD	KK Miskin
2.	111 KK	117 KK	PKH DINSOS	KK Miskin
3.	10 KK	14 KK	BST DINSOS	KK Miskin

Peningkatan jumlah angka kemiskinan yang ada di Desa Polewali pada tahun 2021 mencapai angka 70%, hal ini terbukti dengan jumlah penerima bantuan pemerintah, baik dari BLT DD, PKH Dinsos, BST Dinsos yang mencapai 374 KK dimana $\frac{1}{2} + 1$ dari jumlah KK yang ada di Desa Polewali. Namun perlu kejadian itu disebabkan oleh adanya kecenderungan pendapatan masyarakat yang relatif menurun, kondisi tersebut amat terasa sepanjang pandemi Covid-19. Dari hasil Observasi sebelumnya, dikemukakan bahwa kemiskinan yang ada di Desa polewali apabila dilihat secara keseluruhan, jumlah penduduk yang mencapai 1.989 jiwa dengan jumlah kepala keluarga 549 KK. Persoalan kemiskinan memang tidak bisa lepas dari Desa karena Desa merupakan objek dan masyarakat miskin kebanyakan ada di Desa sehingga demikian pemerintah pusat mengeluarkan suatu program yang berkelanjutan yaitu SDGs yang salah satu tujuannya yaitu bagaimana menekan angka kemiskinan di Desa sehingga tidak terus menjadi perbincangan (Gazzola et al., 2020).

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan upaya pembangunan berkelanjutan yang menjadi acuan pembangunan Desa termasuk soal kemiskinan. Mengingat surat edaran kementerian Desa tentang pelaksanaan program SDGs ini menjadi perhatian semua orang di Desa Khususnya Desa Polewali, yang mana di harapkan program ini bisa menekan angka kemiskinan dengan cepat dan menekan kesenjangan sosial di Desa Polewali. Program SDGs ini telah diterapkan di Desa Polewali pada bulan april 2021 sampai bulan mei 2021 dengan dihadiri unsur

Kecamatan, Pendamping Desa, Pemerintah Desa, dan Tokoh Masyarakat dengan menugaskan nama-nama untuk pemuthakiran data SDGs di wilayah Desa Polewali yang dilakukan dengan pendataan manual dan pengimputan online. Program SDGs ini tentunya mendapatkan respon yang baik dari pihak masyarakat terkait tentang pelaksanaan program SDGs ini, baik yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan maupun pengawasan dari proses penerapan SDGs ini.

Masyarakat sangat antusias dan mendukung serta memberikan support kepada relawan yang bertanggung jawab dalam penerapan program SDGs karena masyarakat mengharapkan ini salah satu langkah untuk bagaimana bisa keluar dari zona kemiskinan dan mendapatkan manfaat dari program SDGs ini. Langkah awal yang telah dilakukan Pemerintah Desa untuk mewujudkan tujuan SDGs ini yaitu pendataan dan pemetaan. Terkait langkah untuk bagaimana mengentaskan kemiskinan itu sudah dilakukan tapi bagaimana untuk mengoptimalkan itu masih belum, tapi kemiskinan itu sudah bisa ditekan sedemikian mungkin supaya kemiskinan itu tidak terus menjadi perbincangan.

Ada tiga hal yang perlu dilakukan dalam Penerapan Program SDGs di Desa Polewali yang mampu mengurangi tingkat kemiskinan sesuai dengan tujuan SDGs yaitu: 1. meningkatkan pendapatan masyarakat miskin, 2. menjamin akses pelayanan desa, 3. melindungi masyarakat dari segala bentuk bencana.

1. Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Miskin

Peningkatan pendapatan penduduk masyarakat di desa polewali salah satu yang telah dilakukan yaitu pembudidayaan ikan air tawar yang merupakan langkah awal untuk mengurangi angka kemiskinan yang ada dan dengan adanya program SDGs ini yang mendukung pemerintah Desa untuk bagaimana mempunyai rencana kedepan dalam pemberdayaan masyarakat dalam hal mensejahterakan masyarakat Desa.

Tabel 4. Nama-Nama Penerima Bibit Ikan Nilai Desa Polewali

No	Nama	Jumlah Ikan	Alamat
1.	Lallo	1.700	Dusun Bontopaddu
2.	Adil	500	Dusun Bontopaddu
3.	Herlan	1.000	Dusun Bontopaddu
4.	Irfan	1.500	Dusun Bontomanai
5.	Tahere	1.600	Dusun Bontomanai
6.	Ilyas	500	Dusun Bontomanai
7.	Andi Baso	1.000	Dusun Bontomanai
8.	Ansar	500	Dusun Bontomanai
9.	Tohe	1.000	Dusun Bontomanai
10.	Herdianto	200	Dusun Bontomanai
11.	Dahlan	1.000	Dusun Bontomanai
12.	Anwar	200	Dusun Bontomanai
13.	Salama	1.500	Dusun Jenna
14.	Tasrim	500	Dusun Jenna
15.	Akmal	800	Dusun Lengkese
16.	Noni	200	Dusun Mattirolau
17.	Hijrah	300	Dusun Mattirolau
18.	Jake	300	Dusun Mattirolau
19.	Ajji	300	Dusun Mattirolau
20.	Suardi	300	Dusun Mattirolau
21.	Soi	300	Dusun Mattirolau

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa peningkatan pendapatan penduduk masyarakat miskin di Desa polewali sangat di dukung oleh pemerintah desa, bisa dilihat dari program yang di keluarkan pemerintah desa yaitu pembudidaya ikan air tawar yang diberikan bibit kepada masyarakat setiap dusun yang memiliki lahan empang dan tentunya itu juga tidak bisa lepas dari masyarakat yang bekerja keras dan berusaha untuk keluar dari kemiskinan itu.

2. Menjamin Akses Terhadap Pelayanan Desa

Kemudahan dalam mengakses pelayanan desa di Polewali merupakan salah satu target *Sustainable Development Goals* (SDGs) menjamin adanya hak yang sama dalam kemudahan mengakses. Pemerintah Desa terus berusaha dan berbenah untuk memberikan pelayanan yang baik untuk masyarakat sesuai dengan motto yang dimiliki yaitu PATTAPI (pelayanan yang amanah, tepat dan tanpa pungli) dan

tentunya menjamin semua masyarakat mendapatkan hak yang sama dalam kemudahan mengakses pelayanan.

Tabel 5. Jenis pelayanan di Desa Polewali

No	Jenis Pelayanan	Tahun	
		2020	2021
1.	Surat pengantar permohonan penerbitan kartu tanda penduduk	17	8
2.	Surat pengantar permohonan penerbitan kartu keluarga	35	37
3.	Surat pengantar permohonan penerbitan akta kelahiran	9	0
4.	Surat pengantar permohonan penerbitan surat keterangan pindah	34	31
5.	Surat keterangan kematian dan penguburan.	5	8
6.	Surat pengantar surat keterangan catatan kepolisian (SKCK)	0	0
7.	Surat keterangan tidak mampu/ tidak mampu	33	51
8.	Surat pengantar permohonan penerbitan surat izin tempat usaha (SITU), izin gangguan (HO), tanda daftar perdagangan (TDP) surat izin usaha perdagangan (SIUP)	0	0
9.	Surat keterangan permohonan penerbitan izin mendirikan bangunan (IMB)	0	0
10.	Surat keterangan kepemilikan tanah	16	19
11.	Surat keterangan ahli waris	3	2
12.	Surat pengantar penerbitan izin usaha mikro dan kecil (IUMK)	5	0
13.	Surat permohonan bantuan bencana	0	0
14.	Surat keterangan ternak (domisili/mutasi/kartunisasi)	3	2
15.	Surat persetujuan izin penelitian	5	2
16.	Surat pengantar permohonan proposal bantuan	0	0
17.	Surat pengantar dispensasi nikah/wali nikah/imunisasi/catin	44	38
18.	Surat keterangan mahar	7	13
19.	Surat keterangan belum menikah/sudah menikah	1	0
20.	Surat keterangan penghasilan orang tua	0	0
21.	Surat pengantar ijin keramaian dan ijin tutup jalan	5	0

22.	Surat keterangan ijin potong ternak	5	1
23.	Surat pengantar potong kayu	10	4
24.	Surat keterangan usaha	58	108
25.	Surat keterangan jual beli tanah	18	4
26.	Surat keterangan lain-lain	18	25

Sumber : Kantor Desa Polewali, Tahun 2021

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa tentunya semua masyarakat akan mendapatkan hak yang sama dalam pelayanan desa yang ada di desa polewali namun adapun kendala yang masih dirasakan masyarakat yaitu kurang ketepatan waktu dalam pembukaan pelayanan di Kantor Desa. Adapun pelayanan di Desa Polewali yang paling banyak dilakukan dari tahun 2020-2021 yaitu pelayanan surat keterangan usaha dan pelayanan yang paling sedikit yaitu pelayanan surat keterangan permohonan penerbitan izin mendirikan bangunan.

3. Melindungi Seluruh Masyarakat dari Segala Bentuk Bencana

Penerapan program SDGs dalam meningkatkan Desa tangguh bencana merupakan salah satu cara melindungi atau membangun ketahanan masyarakat dari segala bencana. Pemerintah Desa Polewali telah membentuk relawan bencana desa yang dikordinir langsung oleh kepala dusun dan bekerja sama dengan kelompok pemuda dan BPD, Pemerintah Desa telah melakukan pendataan-pendataan potensi daerah yang rawan bencana dan langkah apa yang akan dilakukan ketika ada bencana dengan melakukan petaan dengan memasang rambu-rambu papan peringatan bencana.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Desa Polewali dalam meningkatkan Desa Tangguh Bencana yaitu:

- Melakukan pendataan-pendataan potensi daerah yang rawan bencana di setiap dusun di Desa Polewali.



Gambar 1. Peta Rawan Bencana Desa Polewali

- b. Membentuk Relawan Bencana Desa Pemerintah Desa Polewali dalam meningkatkan Desa Tangguh Bencana telah membentuk Relawan bencana Desa yang dikordinir langsung oleh kepala Dusun dan bekerja sama dengan kelompok pemuda dan BPD.
- c. Pemerintah Desa melakukan kordinasi langsung terhadap Pemerintah Daerah Badan Penanggulangan Bencana Desa (BPBD) apabila terjadi bencana di Desa Polewali.

KESIMPULAN

Penerapan Program *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa Polewali telah diterapkan sesuai dengan surat edaran Kementrian Desa tentang pelaksanaan Program SDGs. Meskipun Keberlanjutan Program SDGs ini masih dalam tahap perencanaan, terkait dari implementasi *Sustainable Development Goals* (SDGs) ini masih belum dirasakan oleh masyarakat Desa Polewali, namun untuk penerapannya sudah terlaksana dengan baik. Dilihat dari Pemerintah Desa yang telah melakukan pendataan langsung kepada masyarakat dengan pembaharuan data 1 kali dalam 3 bulan. Hasil dari pendataan inilah yang akan menjadi acuan dari Pemerintah itu sendiri untuk membuat perencanaan Desa mulai dari perencanaan pembangunan dan strategi yang harus dilakukan dalam hal khususnya di bidang kemiskinan. Pemerintah Desa Polewali dalam penerapan program SDGs untuk mengurangi angka kemiskinan telah melakukan beberapa kegiatan di Desa Polewali sesuai dengan tujuan dari program SDGs yaitu: Program Meningkatkan Pendapatan Penduduk Miskin, Menjamin Akses Terhadap Pelayanan Desa dan Melindungi Masyarakat dari segala bentuk bencana

DAFTAR PUSTAKA

- Affandi, R. A., Permana, A., Yani, Y. M., & Mursitama, T. N. (2020). Implementing SDG to Village Level by Integrating Social Capital Theory and Value Chain: (Case of Village Tourism Pentingsari in Yogyakarta, Indonesia). *JAS (Journal of ASEAN Studies)*. <https://doi.org/10.21512/jas.v7i2.5780>

- Amalia, D. (2019). Analisis Pengaruh Infrastruktur Terhadap Tertumbuhan Ekonomi (Studi Pada 33 Provinsi di Indonesia Tahun 2008–2017). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*.
- Amani, T., Rahajeng, Y., & Hermanto, H. (2020). Potential Causes Of Poverty In The City Of Probolinggo. *Wiga: Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi*. <https://doi.org/10.30741/wiga.v10i2.598>
- Andari, R. N. (2021). Resensi: SDGs Desa, Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan. *Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja Dan Administrasi Pelayanan Publik*. <https://doi.org/10.31845/jwk.v24i1.713>
- Bontempi, E., Sorrentino, G. P., Zanoletti, A., Alessandri, I., Depero, L. E., & Caneschi, A. (2021). Sustainable materials and their contribution to the sustainable development goals (SDGs): A critical review based on an italian example. *Molecules*. <https://doi.org/10.3390/molecules26051407>
- Brady, D. (2019). Theories of the Causes of Poverty. In *Annual Review of Sociology*. <https://doi.org/10.1146/annurev-soc-073018-022550>
- Breuer, A., Janetschek, H., & Malerba, D. (2019). Translating Sustainable Development Goal (SDG) Interdependencies into Policy Advice. *Sustainability*. <https://doi.org/10.3390/su11072092>
- Clarke, P., & Erreygers, G. (2020). Defining and measuring health poverty. *Social Science and Medicine*. <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2019.112633>
- Gazzola, P., Pavione, E., Amelio, S., & Magrì, J. (2020). Smart Industry e sviluppo sostenibile, imprese intelligenti e SDGs 2030. *Economia Aziendale Online*, 11(1), 41–53. <https://doi.org/10.13132/2038-5498/11.1.41-53>
- Haywood, L. K., & Boihang, M. (2021). Business and the SDGs: Examining the early disclosure of the SDGs in annual reports. *Development Southern Africa*. <https://doi.org/10.1080/0376835X.2020.1818548>
- Ishartono, I., Rusyidi, B., & Raharjo, S. T. (2017). POTRET ORANG MISKIN DARI PERSPEKTIF KEKUATAN. *Share: Social Work Journal*. <https://doi.org/10.24198/share.v7i1.13816>
- Jokowi. (2020). Perpres No. 18 Tahun 2020. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019*.
- Kambubuy, S. K., & Budiasih, B. (2020). MAMPUKAH PROVINSI PAPUA MENCAPAI TUJUAN PERTAMA DARI SDGs? *Seminar Nasional Official Statistics*. <https://doi.org/10.34123/semnasoffstat.v2019i1.214>
- Kola, L., & Owumi, B. (2019). Causes of Poverty in Old Age, Not a Structural Failing? *Journal of Aging and Social Policy*. <https://doi.org/10.1080/08959420.2019.1642692>
- NECHITA, E., MANEA, C. L., IRIMESCU, A. M., & NICHITA, E.-M. (2020).

The Content Analysis of Reporting on Sustainable Development Goals. *Audit Financiar*. <https://doi.org/10.20869/auditf/2020/160/030>

Permatasari, P., Ilman, A. S., Tilt, C. A., Lestari, D., Islam, S., Tenrini, R. H., Rahman, A. B., Samosir, A. P., & Wardhana, I. W. (2021). The village fund program in indonesia: Measuring the effectiveness and alignment to sustainable development goals. *Sustainability (Switzerland)*. <https://doi.org/10.3390/su132112294>

Raharjo, S. T., & Ishartono. (2014). Sustainable Development Goals (SDGs) dan Pengetasan Kemiskinan. *Social Work Jurnal*.

Ravallion, M. (2020). On measuring global poverty. In *Annual Review of Economics*. <https://doi.org/10.1146/annurev-economics-081919-022924>

Setiawan, M. Y., Novianti, T., & Najib, M. (2021). The Impact of Bank Indonesia Regulation No. 17/3/2015 on Exchange Rate: Analysis Using Vector Error Correction Model (VECM). *Binus Business Review*. <https://doi.org/10.21512/bbr.v12i2.6570>

Shah, R. V., & Acharya, A. B. (2021). Waste management businesses and sustainable development goals-exploring linkages. *Ecology, Environment and Conservation*.

Sjaf, S., Kaswanto, K., Kuniawati Hidayat, N., Ardinal Barlan, Z., Elson, L., Sampean, S., & Firda F Gunadi, H. (2021). Measuring Achievement of Sustainable Development Goals in Rural Area: A Case Study of Sukamantri Village in Bogor District, West Java, Indonesia. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*. <https://doi.org/10.22500/9202133896>

Surya, R. Z. (2019). ANALISA KESELARASAN SDGs DENGAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA SERESAM DI DESA SERESAM DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU. *Selodang Mayang*.

Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2014). Economic Development, Twelfth edn. *Pearson Addison Wesley, Boston*.

Trimulato, T., Syamsu, N., & Octaviany, M. (2021). Sustainable Development Goals (SDGs) Melalui Pembiayaan Produktif UMKM di Bank Syariah. *Islamic Review: Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman*. <https://doi.org/10.35878/islamicreview.v10i1.269>

UNDP & World Bank Group. (2016). Transitioning from the MDGs to the SDGs. *The United Nations Development Programme (UNDP) and the World Bank Group (WGG)*.

Waheed Olowa, O. (2012). Concept, Measurement and Causes of Poverty: Nigeria in Perspective. *American Journal of Economics*. <https://doi.org/10.5923/j.economics.20120201.04>

Wang, H., Zhao, Q., Bai, Y., Zhang, L., & Yu, X. (2020). Poverty and Subjective

Poverty in Rural China. *Social Indicators Research*.
<https://doi.org/10.1007/s11205-020-02303-0>

Wardoyo, B. (2020). Penerapan Sustainable Development. *Jurnal Bina Ketenagakerjaan*.

Woodbridge, M. (2015). From MDGs to SDGs: What are The Sustainable Development Goals? *Urban Issues*.